# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Dalam dinamika hubungan internasional pada masa kini, isu-isu yang terjadi di antara aktor hubungan internasional mulai mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Terlebih lagi setelah usainya Perang Dunia II dan juga Perang Dingin atau yang lebih dikenal sebagai *Cold War* yaitu persaingan ideologi antar dua negara (Amerika Serikat dan Unisoviet), dunia internasional dapat menyaksikan munculnya fenomena cara pandang baru untuk menyelesaikan konflik antar negara. Faktor globalisasi turut serta mempengaruhi bagaimana bergesernya cara pandang dunia dalam penyelesaian kesalahpahaman antar dua negara atau lebih. Sebelum Perang Dunia usai, aktor hubungan internasional (*state*) menggunakan cara pandang realis yang lebih mengutamakan *hard power* dimana perang adalah jalan terakhir untuk mencapai kesejahteraan negara, maka saat ini liberalisme memainkan perannya dengan cara *soft power* dimana para aktor tidak lagi berperang seperti dahulu, akan tetapi lebih menggunakan konsep kerjasama demi menciptakan perdamaian dunia.

Konsep kerjasama yang di usung oleh cara pandang liberalisme ini membawa negara-negara didunia kearah bentuk tatanan dunia baru yang diperkirakan, ekonomi dan kerjasama akan menggantikan geopolitik sebagai faktor kekuatan dalam politik internasional. Diperkuat kembali dengan adanya neo-liberalisme, ialah paham yang mempercayai bahwa ekonomi dapat dimaksimalkan melalui

pasar bebas (*Free Trade*). Pasar bebas mulai diterapkan oleh negara-negara berkembang maupun negara maju, guna memperoleh keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan nasionalnya. Proses kerjasama dalam hubungan internasional setiap negara memiliki caranya tersendiri untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang diambil guna mencapai tujuannya dalam keterbatasan negara tersebut. Suatu negara memiliki kebijakan politik luar negerinya masing-masing agar mampu berinteraksi dan bersaing di lingkup internasional.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Plano & Olton, 1999, p. 5). Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentutakan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu (Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, 1994, p. 184). Oleh karena itu, aksi-reaksi keputusan kebijakan luar negeri negara-negara, baik yang berorientasi keluar maupun kedalam bertujuan untuk semakin meningkatkan pendapatan negara serta mendapatkan *maximum advantage* guna memperkuat ekonomi mereka, sehingga semakin baik dan kuat kondisi ekonominya maka tingkat *power* dan dominasi negara tersebut juga semakin menguat.

Setiap negara berkompetisi dalam mendongkrak ekonominya agar dapat menjadi negara yang dapat mendominasi perekonomian dunia. Seperti salah satu contohnya, negara Amerika Serikat sebagai negara *super power* yang saat ini masih tercatat sebagai nomor satu dengan kekuatan ekonominya mulai terancam eksistensinya dengan negara Tiongkok yang mengalami kemajuan pesat saat negara Tiongkok mereformasi ekonominya dan meliberalisasi rezim perdagangannya pada akhir 1970-an. Sebagai presiden saat ini, Donald Trump merasa globalisasi ternyata merugikan Amerika Serikat, akhirnya Presiden Trump mengeluarkan kebijakan sebagai realisai kampanye kepresidenannya *US first, Make America Great Again* yang memicu perang dagang antar dua negara raksasa yang mempunyai peran besar dalam perekonomian global. Hal ini bermula ketika Amerika mengalami defisit (barang impor lebih besar dibandingkan barang ekspor) yang semakin membesar dari negara Tiongkok, sehingga Amerika mengeluarkan kebijakan penetapan bea masuk impor produk asal Tiongkok senilai US$ 60 miliar atau setara 825,2 triliun, hal tersebut mematik ketegangan atar dua negara penguasa ekonomi dunia saat ini. Merespon dari tindakan Amerika tersebut, Tiongkok membalas hal serupa dengan menaikan tarif impor hingga 25 persen terhadap produk-produk Amerika senilai US$ 3 milar atau setara 41,3 triliun rupiah untuk 128 jenis barang konsumen dari Amerika Serikat (Indonesia C. , 2018). Perdagangan utama Amerika Serikat ke Tiongkok sendiri pada tahun 2017 antara lain berupa produk Jet Boeing dan peralatan penerbangan lainnya, kacang kedelai anggur dan daging babi. Sedangkan ekspor utama Tiongkok ke Amerika Serikat adalah tekstil, pakaian, sepatu, bahan baku pesawat, perangkat komunikasi dan besi (rel kereta).

 Sebagai negara peringkat pertama dan kedua dengan ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki pengaruh besar dalam perekonomian global yang sudah terstruktur hingga saat ini, sehingga dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dapat berpengaruh secara global termasuk dengan perekonomian Indonesia. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, efek paling terasa adalah turunnya nilai ekspor Indonesia pada awal tahun 2019. Sebagai salah satu negara pengekspor barang komoditas mentah seperti *palm oil* dan batu bara ke Tiongkok dan Amerika Serikat, Indonesia akan merasakan dampak dari perang dagang kedua negara raksasa tersebut pasalnya imbas terbesar terjadi pada neraca perdagangan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan ekspor terjadi secara kumulatif pada Januari sampai April 2019. Nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan 9,39 persen atau sebesar USD$53,2 juta (Badan Pusat Statistik, 2019).

Keterkaitan kinerja ekspor Indonesia dengan perang dagang adalah dikarenakan Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi mitra dagang (pangsa ekspor) terbesar Indonesia, terlebih lagi ketika Tiongkok mengalami keterbatasan akses masuk ke Amerika Serikat begitupun sebaliknya, dan kedua negara tersebut mengalami surplus produksi (barang) maka negara-negara seperti indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara bukan tidak mungkin Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang hasil produksi dari Amerika dan Tiongkok. Negara dengan GDP yang dikategorikan sebagai “kelas menengah”, Indonesia berada di posisi yang tidak menguntungkan dengan adanya perang dagang Amerika-Tiongkok ini, salah satu solusinya untuk mengatasi dan keluar dari pengaruh perang dagang Amerika-Tiongkok ialah mencari pasar baru untuk menjual produk dari Indonesia.

Dengan kebijakan dan prinsip politik luar negerinya yakni “Bebas-Aktif” Indonesia memanfaatkannya dengan sangat baik untuk melakukan kerjasama dengan berbagai negara baik secara bilateral maupun multilateral dalam forum-forum regional dan internasional. Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia juga terus difokuskan pada kerjasama internasional yang diharapkan menjadi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, hingga saat ini Indonesia telah mencatatkan lebih dari 314 perjanjian internasional yang disepakati (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Pemerintah Indonesia dalam usahanya tengah mengupayakan diversivikasi (penyeragaman) pasar ekspor yang diyakini menjadi salah satu alternatif terbaik dalam upaya mencegah penurunan nilai ekpor Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia kini tengah gencar membuka peluang dan mencari pasar baru untuk mendongkrak pertumbuhan perdagangan ekonomi Indonesia, salah satunya mebuat perjanjian bersama pasar non-tradisional yang dinilai lebih potensial bagi pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia.

Secara umum, pasar tradisional merupakan negara mitra dagang Indonesia yang dinilai telah memiliki hubungan kerjasama ekonomi yang kuat dan menjadi tujuan pasar ekspor Indonesia sejak lama seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, Tiongkok dan negara-negara kawasan Eropa. Pasar non-tradisional merupakan negara-negara yang potential secara ekonomi dan prospektif sebagai tujuan pasar bagi Indonesia seperti negara-negara dikawasan Amerika Latin, Asia Tengah, Asia Selatan. Pasar non-tradisional yang sedang diupayakan oleh pemerintah Indonesia adalah negara-negara di Afrika dan Asia Selatan, salah satunya negara Bangladesh yang kini menjadi target pasar ekspor Indonesia.

Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara dan timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Bangladesh bersama dengan Benggala Barat di India, membentuk kawasan etno-linguistik Benggala. Bangladesh secara harfiah bermakna Negara Bangla yang ber IbuKota-kan Dhaka. Perbatasan Bangladesh ditettapkan melalui pemisahan India pada tahun 1947, negara ini merupakan sayap timur Pakistan yang terpisah dari sayap barat sejauh 1.600 kilometer. Perbedaan politik, bahasa, dan ekonomi menimbulkan perpecahan antara kedua sayap, yang berujung pada meletusnya perang kemerdekaan tahun 1971 dan pendirian negara Bangladesh. Tahun-tahun setelah kemerdekaan ditandai dengan kelaparan, bencana alam, kemiskinan, huru-hara politik, korupsi, dan kudeta militer. Bangladesh memiliki jumlah penduduk terbesar ketujuh (berjumlah 160 juta jiwa lebih) di dunia dengan luas sebesar 144.000 km2 dan merupakan salah satu terpadat di dunia yang tingkat kemiskinannya tinggi, tetapi pendapatan per-kapita Bangladesh yang berjumlah US$ 1.171 telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinan turun 20% sejak awal tahun1990-an (Suwarno, 2012, p. 192).

Bangladesh merupakan negara kesatuan yang memiliki sitem pemerintahan demokrasi parlementer, yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara. Namun kendali pemerintahan sesungguhnya dipegang oleh Perdana Mentri yang merupakan kepala pemerintahan. Memiliki kebijakan luar negeri yang moderat dan bergantung pada diplomasi multinasional. Pada tahun 1974, negara ini bergabung dengan persemakmuran dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 1978-1979 dan 2000-2001. Pada tahun 1980-an, Bangladesh memainkan peran penting dalam pendirian *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) (Thohir & Kusdiana, 2006, p. 338).



**Gambar 1. Peta Bangladesh**

Bangladesh dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang sangat baik seperti contohnya, pada tanggal 24-29 Januari 2018 Presiden Joko Widodo telah melakukakn kunjungan ke 5 negara yang berada di kawasan Asia Selatan, yaitu Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan. Kunjungan luar negeri tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan hubungan diplomasi Indonesia agar tidak selalu terarah ke negara-negara Asia Timur, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat, tetapi juga perlu diarahkan untuk melihat potensi negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Selatan sekaligus menjalankan misi untuk memperkuat persahabatan dan kerja sama. Dalam kunjungannya ke negara Bangladesh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sepakat untuk meningkatkan kerjasama, peluang peningkatan kerjasama cukup terbuka jika memerhatikan nilai perdagangan kedua negara tahun 2017 yang menunjukan peningkatan sebesar 25,96% atau senilai US$ 1,53 miliar (TheJakartaPost, 2018).

Sebagai salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan resmi terhadap kemerdekaan Bangladesh yaitu pada bulan februari 1972, Indonesia memiliki aset besar dalam menjalin hubungan bilateral yang erat dan bersahabat dengan Bangladesh. Kenyataan sesama negara berpenduduk muslim terbesar, serta sesama anggota PBB, Konferensi Asia-Afrika (KAA), GNB, OKI, D-8, G77, ARF serta berbagai forum kerjasama antar negara berkembang juga telah menjadikan Indonesia dan Bangladesh memiliki kesamaan pandang atas berbagai isu regional/internasional yang merupakan kepentingan bersama, dalam fora multilateral Bangladesh sering mendukung kepentingan Republik Indonesia. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015). Kedua negara tersebut telah menyepakati beberapa kerjasama diantaranya, di bidang energi kedua negara menyepakati LoI mengenai supply LNG dari Pertamina ke Petrobangla selanjutnya di bidang Kelautan dan Perikanan, Pemerintahan Indonesia dan Bangladesh menyetujui penandatanganan komunike bersama terkait pemberantasan IUU (Illegal, Unreported, and Unregistered) Fishing. Sementara itu di bidang Konektivitas kedua negara tersebut menandatangani untuk *Joint Ministerial on the Launching of the Negotiations for Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement* (IB-PTA), yang siap mendukung dalam pengembangan konektivitas Bangladesh.

Mengenai kerjasama dengan Bangladesh, kini Indonesia tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah (komoditas mentah) melainkan mengekspor produk berbasis manufaktur dimana memiliki arti merubah atau mengolah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi yang memiliki nilai tambah melalui proses secara mekanis dengan menggunakan mesin ataupun tanpa menggunakan mesin yang memenuhi standar spesifikasi dengan produksi dalam skala besar, salah satunya yang berupa dan direalisasikan oleh PT INKA dalam pembuatan Gerbong Kereta Api ke Bangladesh.

Kereta api menjadi salah satu moda transportasi favorit di Bangladesh dengan jumlah penumpang yang mencapai puluhan juta pertahun, Pemeritah Bangladesh berencana untuk meningkatkan kapasitas kereta api nya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Bangladesh sebagai penunjang mobilitas sehari-hari. Potensi ini kemudian dilirik oleh produsen kereta api Indonesia dalam hal ini PT INKA untuk memenuhi permintaan tersebut. PT Industri Kereta Api atau PT INKA (Persero) merupakan Usaha Milik Negara (BUMN) manufaktur kereta api terintegrasi pertama di Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 18 mei 1981, berfokus pada mneghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tinggi dan menyediakan *after sales* untuk memastikan bahwa barang yang telah di ekspor dengan kualitas terbaik (PT INKA (Persero), 2017).

Menindaklanjuti *Joint Ministerial on the Launching of the Negotiations for* Indonesia-Bangladesh *Preferential Trade Agreement* (IB-PTA), industri strategis Indonesia semakin gencar melakukan penetrasi pasar di Bangladesh, pada tahun 2017 PT INKA berhasil memenangkan tender pengadaan gerbong penumpang kereta api ke Bangladesh senilai USD 75 juta yang akan dikirimkan mulai pada bulan januari 2019 terdiri dari 250 unit yang diadakan oleh Bangladesh Railway. Bukan tanpa rintangan, Indonesia memenangkan persaingan tender ini dengan menyingkirkan pesaingnya yaitu negara Tiongkok dan India yang juga mengikuti tender pengadaan gerbong kereta api ke Bangladesh tersebut.

Kerjasama Indonesia-Bangladesh ini menjadi alternatif baru sebagai pendongkrak perekonomian di Indonesia di tengah pengaruh perekonomian global yang kian memanas, sehingga penulis tertarik dan akan membahas **“Kerjasama Indonesia-Bangladesh Dalam Peningkatan Produk Ekspor Gerbong Kereta Api Indonesia ke Bangladesh”.**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terlah di paparkan terkait Kerjasama Indonesia-Bangladesh Dalam Peningkatan Ekspor Gerbong Kereta Api Indonesia ke Bangladesh, penulis akan mengkaji dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama Indonesia dengan Bangladesh?
2. Bagaimana ekspor gerbong kereta api Indonesia?
3. Bagaimana program kerjasama Indonesia dengan Bangladesh dalam peningkatan produk ekspor gerbong penumpang kereta api Indonesia ke Bangladesh?

### Pembatasan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang ada kedalam waktu dari masalah yang diteliti. Dalam segi aspeknya, penulis hanya memfokuskan pada Kerjasama Indonesia-Bangladesh dalam peningkatan ekspor gerbong kereta api Indonesia ke Bangladesh dari periode 2006 sampai sekarang (2019).

### Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, maka penulis akan merumuskan **BagaimanaImplementasi program *Joint Ministerial on the Launching of the Negotiations for Indonesia-Bangladesh Prefential Trade Agreement (IB-PTA)* dalam peningkatan produk ekspor gerbong kereta api Indonesia ke Bangladesh?**

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha memperdalam pemahaman dan pengetahuan akan suatu permasalahan dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dan metodelogis. Tuujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan serta bidang yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana kerjasama Indonesia dengan Bangladesh
2. Untuk memahami Bagaimana ekspor gerbong kereta api Indonesia ke Bangladesh
3. Untuk mengetahui Bagaimana Program Kerjasama *Joint Ministerial on the Launching of the Negotiations for Indonesia-Bangladesh Prefential Trade Agreement (IB-PTA)*dalam peningkatan ekspor Gerbong kereta api ke Bangladesh

### Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengukur sejauh mana kemampuan serta pemahaman penulis dalam menganalisis kerjasama ini dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional dengan pembelajaran yang telah didapatkan penulis selama masa perkuliahan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literature bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian mengenai Studi Ilmu Hubungan Internasional di masa yang akan datang
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca khususnya mahasiswa Hubungan Internasional dan masyarakat luas pada umunya
4. Sebagai bahan evaluasi dan pertimbagan bagi aktor hubungan internasional, dalam hal ini khususnya negara Indonesia untuk merumuskan langkah-langkah-langkah strategis dalam merespon dinamika isu-isu global di masa yang akan datang
5. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Skripsi Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung